

Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila Terhadap Konflik di Indonesia

Ratna Yulianti¹, Reva Oktafiana²

D3 Bahasa Mandarin, Universitas Sebelas Maret Surakarta

Corresponding author's emails:

¹ revaoktafiana@student.uns.ac.id

² ratnayulianti@student.uns.ac.id

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang Peran pendidikan kewarganegaraan dalam pencegahan konflik yang ada di Indonesia. Tujuan jurnal ini adalah untuk mencari tahu bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan yang menjadi pelindung supaya dapat mencegah konflik yang ada di Indonesia. Metode untuk mendukung jurnal ini adalah menggunakan cara studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dari karya ilmiah, jurnal, dan lainnya sebagainya yang relevan dengan topik. Penyusunan jurnal ini yaitu dengan menelaah, literatur, menganalisis dan akhirnya mengambil kesimpulan. Hasilnya adalah bahwa pendidikan kewarganegaraan sangat penting guna membangun karakter bangsa bagi setiap individu yang ada.

Kata Kunci : Pendidikan kewarganegaraan, Konflik

1. Pendahuluan

Konflik merupakan suatu fenomena sosial yang kerap terjadi dalam masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda, di mana dari perbedaan itulah ada kalanya memunculkan suatu pertentangan atau konflik. Keberagaman menjadi pemicu utama konflik yang terjadi. Keragaman masyarakat Indonesia menjadikan lingkungan sosial begitu unik. Namun, perbedaan juga bisa menjadi sumber konflik sosial. Bukan hanya karena perbedaan, konflik sosial juga bisa muncul karena faktor yang berbeda. Ada beberapa alasan konflik, seperti tujuan organisasi yang bertentangan, interpretasi fakta yang berbeda, dan banyak lainnya. Arti kata konflik sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perselisihan, ketidaksepakatan dan pertikaian. Konflik sosial adalah konflik seumur hidup antara anggota maupun golongan di dalam masyarakat. Konflik sosial adalah suatu bentuk interaksi sosial antara pihak-pihak sosial yang ditandai dengan saling mengancam, menekan dan saling merusak. Konflik sosial adalah proses di mana dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan relatif sama bertabrakan dalam hal-hal yang sifatnya terbatas. Dalam bentuknya yang ekstrem, konflik dilakukan tidak hanya untuk mempertahankan hidup dan eksistensi, tetapi juga bertujuan untuk menghancurkan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingan.

Masyarakat bukanlah sekelompok orang yang sempurna yang dapat terhindar dari kesempatan tak terbatas untuk menghubungkan sesuatu hal dengan lainnya. Oleh karena itu, pranata dasar yang didirikan di suatu daerah memiliki beberapa konsekuensi bagi bidang kehidupan sosial lainnya. Konflik antara kapitalis dan kaum bawah merupakan hal yang sentral dalam masyarakat. Semua konflik melibatkan konsolidasi dari kekacauan yang berkembang. Kaum kapitalis mengelompokkan penduduk, memusatkan tujuan produksi dan memusatkan produksi di antara segelintir orang. Kadang-kadang dapat ditemukan hal-hal di masyarakat yang dianggap baik, tetapi jumlahnya tidak banyak, sehingga ada beberapa golongan yang merasa *minder*, selain yang merasa senang. Misalnya, kekayaan materi, kekuasaan, status, dan lain-lain. Orang cenderung berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan hal-hal tersebut, pihak lain merasa sama-sama berhak atas hal-hal yang dianggap baik sehingga menimbulkan pertengkaran atau konflik. Melibatkan proses konflik hak atas kekayaan, kekuasaan, status, dan sebagainya, di mana satu pihak berusaha untuk menghancurkan yang lain.

2. PENGERTIAN

1. Pendidikan kewarganegaraan

Menurut Zamroni (tim ICCE, 2005:7) menegaskan bahwa konsep pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi, yang bertujuan untuk melatih warga negara dalam berpikir kritis dan bertindak demokratis bagi generasi baru dengan membangkitkan kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan sosial yang melindungi hak-hak sipil yang terjamin dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, menurut Azyumardi Azra, pendidikan kewarganegaraan mengkaji dan mengkaji segala sesuatu tentang pemerintahan, lembaga demokrasi, konstitusi, aturan hukum, hak dan kewajiban warga negara, serta demokrasi. Demokrasi adalah pembelajaran dan proses yang tidak dapat dengan mudah ditiru oleh masyarakat lain. Kelangsungan demokrasi tergantung pada kemampuan mengubah nilai-nilai demokrasi. Beberapa unsur yang terkait dengan pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan, antara lain (Somantri, 2001: 158):

- a. Hubungan pengetahuan intraseptif (*intraseptive knowledge*) dengan pengetahuan ekstraseptif (*extraseptive knowledge*) atau antara agama dan ilmu.
- b. Kebudayaan Indonesia dan tujuan pendidikan nasional.
- c. Disiplin ilmu pendidikan, terutama psikologi pendidikan.

- d. Disiplin ilmu-ilmu sosial, khususnya ide fundamental Ilmu Kewarganegaraan.
- e. Dokumen negara, khususnya Pancasila, UUD 1945 dan perundangan negara serta sejarah perjuangan bangsa.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dirumuskan secara luas mencakup proses pembinaan generasi muda untuk memikul peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan khususnya peran pendidikan, termasuk pengajaran, mengajar dan belajar, untuk mempersiapkan warga negara ini. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan bahkan disebutkan dalam Pasal 35(3) UU Dikti No. 12 Tahun 2012. Pada ayat ini, kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang wajib masuk dalam kurikulum pendidikan tinggi bersama agama, Pancasila, dan bahasa Indonesia. Di Indonesia, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan diperkenalkan ke dalam kurikulum sekolah sekitar tahun 1968. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mendekatkan warga negara, khususnya anak sekolah dan siswa dengan bangsanya sendiri. Pendidikan adalah upaya menuntun dan membimbing secara sadar kepada peserta didik yang bertujuan untuk membentuk karakter menjadi terdidik jasmani dan rohani, dalam berinteraksi dengan alam beserta lingkungan sekitarnya. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran wajib yang diajarkan kepada para peserta didik guna untuk mencapai cita-cita bersama yakni menjadi warga negara yang aktif dalam melaksanakan perintah, tugas, hak-haknya dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

2. Pendidikan Pancasila

Pancasila merupakan ideologi negara dan dasar negara Indonesia yang sudah di persiapkan dan direncanakan oleh terdahulu, sudah banyak pertimbangan dalam menetapkannya. Pancasila dijadikan dasar nilai-nilai bangsa dalam mengembangkan, memajukan, menjalankan semua tugas dan kewajiban yang sudah semestinya dilakukan selaras dengan Pancasila. Pancasila merupakan dasar dan pedoman untuk menjadi landasan warga negara supaya mereka terdidik dan mempunyai ideologis yang semestinya setiap individu harus memilikinya agar hidup ke depannya dapat berguna dan bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain dan negara.

Tujuan pendidikan Pancasila adalah untuk dipelajari oleh pelajar di seluruh Indonesia. Pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata kuliah wajib yang selalu ada di perguruan tinggi. Kondisi ini berdasarkan Pasal 35 (5) UU Dikti No. 12 Tahun 2012. Pasal tersebut menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus mencakup mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila,

pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dengan kata lain, pendidikan Pancasila adalah pendidikan ideologis di Indonesia. Tujuan pendidikan Pancasila adalah untuk mendidik warga negara yang baik yang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta yang merasakan cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Pancasila memiliki empat dasar pendidikan yaitu sejarah, budaya, hukum dan filosofis.

Oleh sebab itu pendidikan Pancasila sangat di perlukan untuk membentuk karakter bangsa dari dini, setiap warga negara dapat melakukan dan mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila agar masyarakat dapat terhindar dari konflik dan supaya tidak terlibat di dalamnya, karena sudah mendapatkan pendidikan Pancasila harusnya sudah tahu dan mengerti tata cara dalam berperilaku agar tidak merugikan pihak mana pun, supaya sadar bahwa konflik tidaklah membuat diri menjadi hebat tetapi membuat diri menjadi terlihat tidak bermartabat karena tindakan yang tidak semestinya dilakukan.

3. Konflik

Konflik merupakan fenomena sosial yang ada dimana-mana dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga konflik bersifat esensial, artinya konflik selalu ada di mana saja dan kapan saja, di mana saja dan kapan saja. Konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang berulang kali mengisi setiap kehidupan sosial. "Conflict" secara etimologis berasal dari kata Latin "con" untuk bersama dan "fligere" untuk *collision* atau tabrakan. Dengan demikian, dalam kehidupan bermasyarakat, "konflik" berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain, yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak atau lebih.

Hal yang memicu konflik dan integrasi adalah persamaan dan perbedaan kepentingan sosial. Dalam setiap kehidupan sosial tidak ada satu orang pun yang memiliki persamaan dan perbedaan yang tepat dalam suku, minat, kehendak, kemauan, tujuan, dan lain-lain. Untuk setiap konflik ada beberapa yang dapat diselesaikan, tetapi juga beberapa yang tidak dapat diselesaikan, yang mengarah ke berbagai tindakan kekerasan. Kekerasan dalam institusi dapat muncul dikarenakan hubungan sosial tidak selalu berjalan dengan sempurna, sebab setiap individu memiliki kecenderungan pribadi karena latar belakangnya.

4. CONTOH KASUS

Berikut merupakan contoh Konflik sosial di Indonesia:

1. Konflik sosial di Jakarta 1998 Konflik sosial juga terjadi di Jakarta yang mempengaruhi status daerah tersebut sebagai ibu kota negara. Pada tahun 1998, terjadi konflik di mana masyarakat ditinggalkan atas nama masyarakat adat melalui penggusuran dan kejahatan terhadap etnis Tionghoa.
2. Konflik Sosial di Nusa Tenggara Barat Bagian timur Indonesia yang terletak di Nusa Tenggara Barat juga mengalami jenis konflik sosial lainnya. Konflik ini terjadi antar penduduk Kabupaten Sumbawa Besar yaitu di Desa Lab Badas yang berakar pada perbedaan suku dan budaya.
3. Konflik sosial di Ambon akibat kesenjangan sosial antara Muslim dan Kristen Protestan pada tahun 1998.
 1. Konflik sosial di Situbondo, Jawa Timur, juga terjadi konflik sosial tentang masalah agama yang terjadi di 1996. Ada penghinaan terhadap Islam dan terjadilah konflik.
 2. Konflik sosial antara suku Lampung dan suku Jawa Di bagian tengah Lampung, orang Jawa mengalami konflik dengan suku Lampung. Hal ini terjadi karena masyarakat Kampung Jawa melakukan kekerasan terhadap masyarakat Lampung sehingga penduduk asli melakukan tindakan seperti membakar rumah dan membunuh masyarakat sekitar.

Pada saat yang sama, konflik politik adalah bagian dari konflik sosial, tetapi sumber, skala, dan dimensinya berbeda. Harus diingat bahwa tidak semua konflik sosial digolongkan sebagai konflik politik. Penyebab konflik politik adalah persaingan, pertentangan pendapat, kepentingan atau kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam bidang politik. Berikut merupakan contoh konflik politik di Indonesia yang sangat terkenal yaitu, Pemberontakan PKI di Madiun yang juga dikenal dengan Insiden Madiun. Konflik ini terjadi di provinsi Jawa Timur pada bulan September sampai Desember 1948 antara pemberontak komunis PKI dan TNI.

Upaya pencegahan konflik berdasarkan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Melalui teknik penelitian hukum preskriptif, disimpulkan bahwa: Meningkatkan toleransi dan toleransi tidak hanya dalam pergaulan sosial, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Tujuan penanganan konflik sosial juga untuk menjaga kelangsungan misi negara, melindungi jiwa, harta benda, sarana dan prasarana umum, serta melindungi dan menegakkan hak-hak korban. Rehabilitasi kondisi fisik dan psikis masyarakat, serta sarana dan prasarana umum. Upaya pencegahan konflik menurut Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial adalah upaya untuk memelihara keadaan masyarakat yang damai, mengembangkan sistem penyelesaian sengketa secara damai dan mengurangi potensi konflik, dilakukan melalui Pembentukan sistem peringatan dini. Pencegahan dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah dan kota.

Faktor - Faktor Penyebab Konflik Sosial Beberapa faktor penyebab konflik sosial di masyarakat antara lain:

1. Perbedaan antar individu. Perbedaan sikap dan perasaan dapat menimbulkan konflik di antara setiap individu Oleh karena itu, ini menjadi faktor utama penyebab konflik.
2. Perbedaan budaya. Perbedaan kepribadian seorang individu juga bergantung pada pola budaya yang melatarbelakangi pembentukan dan perkembangan kepribadian, yang sedikit banyak mempengaruhi kepribadian individu dalam budaya tersebut.
3. Perbedaan Kepentingan. Perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok merupakan sumber konflik lain dalam bisnis, politik, dan lain - lain.
4. Perubahan sosial. Perubahan sosial yang berlangsung cepat akan mengubah nilai-nilai dominan dalam masyarakat, yang dapat menyebabkan munculnya kelompok-kelompok berdasarkan sikap yang berbeda.

Dilihat dari berbagai kasus dan penyebabnya dapat diambil kesimpulan bahwa unsur utama penyebab konflik sendiri adalah dari setiap individu sendiri. Perbedaan sifat menyebabkan perbedaan pendapat dari setiap individu, hal tersebut yang memicu terjadinya konflik. Maka yang harus diperbaiki yaitu mulai dari perspektif setiap individu itu sendiri. Namun cara berpikir setiap orang berbeda, maka setidaknya masyarakat harus mempunyai pedoman untuk berpikir agar menyamakan perspektif. Hal tersebut dapat dimulai dari pendidikan yang diberikan. Salah satu caranya adalah adanya pendidikan kewarganegaraan yang dipelajari dan atau diberikan dari berbagai jenjang pendidikan. Dari setingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan di jenjang pendidikan tinggi. Dari yang dipelajari di setiap jenjang, pendidikan kewarganegaraan sendiri mempelajari mengenai berbagai ilmu untuk memberikan bekal nilai-nilai kebangsaan dan pemahaman yang komprehensif tentang konsep wawasan nusantara, ketahanan nasional, hak-hak sipil dan tanggung jawab, demokrasi, konstitusi dan hak asasi manusia dalam menghadapi berbagai tantangan globalisasi termasuk konflik yang terjadi demi Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diambil kesimpulan, tugas dan peran pendidikan kewarganegaraan sendiri adalah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah menjadikan warga negaranya sebagai warga negara yang memahami tujuan bangsa, dengan begitu setiap

individunya mengetahui cara menghadapi setiap kondisi dan masalah untuk meminimalisasi terjadinya konflik di dalam negara.

4. Kesimpulan

Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru, bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Sementara itu, pendidikan Pancasila bertujuan dapat membentuk warga negara yang baik yang paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Mata pelajaran Pancasila sendiri berbeda dengan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila lebih menekankan pada sistem kesepakatan nilai sebagai ideologi dan dasar negara. Sedangkan, pendidikan kewarganegaraan yang bias mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan – pendidikan tersebut diberlakukan agar warga negara mempunyai dasar pemikiran untuk meminimalisasi terjadinya konflik. Dari berbagai kasus dan penyebabnya dapat disimpulkan bahwa faktor utama konflik itu berasal dari masing-masing individu itu sendiri. Perbedaan sifat menimbulkan perbedaan pendapat pada setiap individu sehingga menimbulkan konflik. Maka yang perlu diperbaiki adalah titik tolak dari sudut pandang masing-masing individu. Namun, cara berpikir setiap orang berbeda-beda, sehingga setidaknya masyarakat harus memiliki pedoman berpikir tentang cara pandang yang berjenjang.

Referensi

Sutrisno. Sapriya. Komalasari, Kokom. Rahmat. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan Global Sebagai Revolusi Konflik Sosial. Ponorogo.

Hamisa, Wilda. Murdiono, Mukhammad. (2018). Peran Pendidikan Politik Dalam Membangun Sikap Demokratis dan Partisipasi Siswa dalam Organisasi di SMA. Yogyakarta.

“Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan”. Kompas.com. 19 Februari 2022.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/19/00150031/pentingnya-pendidikan-kewarganegaraan>

Zulfikar, Muhammad Fikri. Dewi, Dinie Anggraeni. (2021). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa. Bandung.